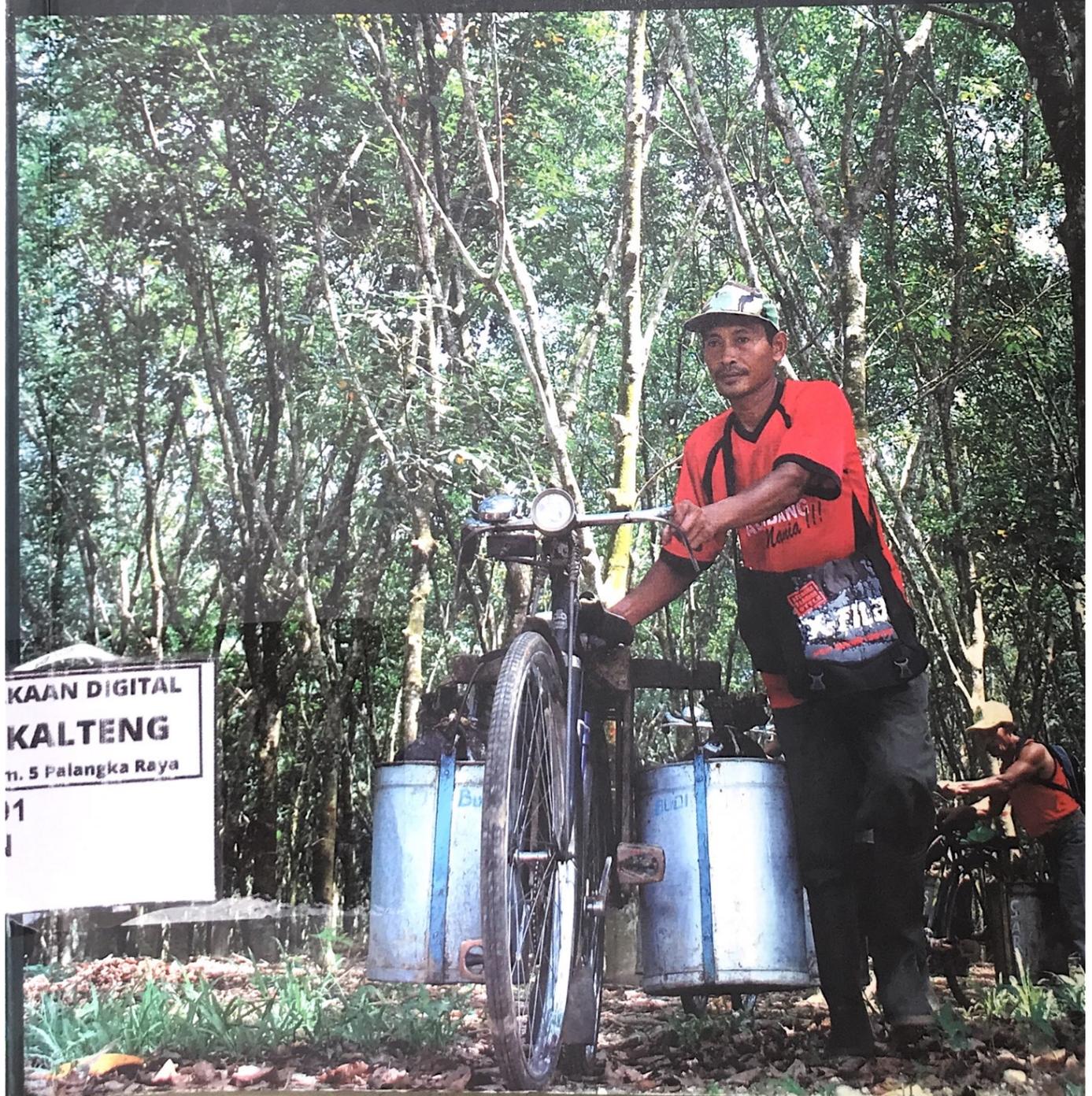


PROSIDING SEMINAR SEHARI

STRATEGI DAN KEBIJAKAN MENDUKUNG AKSELERASI REVITALISASI
PERKEBUNAN KARET DI SUMATERA SELATAN



633.91
HEN
P

Induk	204/07/H/P/2060
Turim	29/07/2060
Suku	H
Ka	633.91
	62.

PROSIDING SEMINAR SEHARI

STRATEGI DAN KEBIJAKAN MENDUKUNG AKSELERASI REVITALISASI
PERKEBUNAN KARET DI SUMATERA SELATAN



BALAI PENELITIAN SEMBAWA

PUSAT PENELITIAN KARET

Jl. Raya Palembang - Pangkalan Balai, Km 29 PO Box 1127 - Palembang

Telp: 0711-7439493, 7439267 Fax: 0711-7439282

E-mail: irri-sbw@mdp.net.id



PROSIDING SEMINAR SEHARI

STRATEGI DAN KEBIJAKAN MENDUKUNG AKSELERASI REVITALISASI
PERKEBUNAN KARET DI SUMATERA SELATAN

JUDUL

PROSIDING SEMINAR SEHARI
Strategi dan Kebijakan Mendukung Akselerasi Revitalisasi
Perkebunan Karet di Sumatera Selatan ,2008

TIM EDITOR

Ketua

Sinung Hendratno

Anggota

Imron Zahri

Andi Maulana

M. Supriadi

Uhendi Haris

Rudi Soehendi

Hermanto

ISBN

978-979-608-020-5

PENERBIT:

BALAI PENELITIAN SEMBAWA

PUSAT PENELITIAN KARET

Jl. Raya Palembang - Pangkalan Balai, Km 29 PO Box 1127 - Palembang

Telp: 0711-7439493, 7439267 Fax: 0711-7439282

E-mail: irri-sbw@mdp.net.id

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

PERUMUSAN HASIL

Program Revitalisasi Perkebunan (Revbun) mempunyai dasar hukum yang dituangkan dalam berbagai peraturan dan surat keputusan, di antaranya adalah Peraturan Menteri Pertanian No 33/Permentan/OT.140/7/2006 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.06/2006. Program Revbun merupakan program percepatan pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan, dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang didukung oleh kredit investasi dan subsidi bunga oleh pemerintah, dengan atau tanpa melibatkan perusahaan di bidang usaha perkebunan sebagai mitra pembangunan kebun, pengolahan, dan pemasaran hasil. Program Revbun Karet merupakan bagian dari Program Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang telah dicanangkan oleh Presiden RI pada bulan Juni 2005.

Program Revbun Karet bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja melalui pengembangan perkebunan, meningkatkan daya saing melalui pengembangan industri hilir berbasis perkebunan, meningkatkan penguasaan ekonomi nasional dengan mengikutsertakan masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya pekebun, dan menjadikan Indonesia sebagai produsen utama komoditas karet. Komoditas karet merupakan salah satu komoditas yang diprioritaskan karena dinilai mempunyai peranan yang strategis sebagai sumber pendapatan masyarakat, mempunyai prospek di pasar domestik maupun ekspor, mampu menyerap tenaga kerja baru, dan berperan dalam pelestarian lingkungan hidup.

Revbun merupakan suatu paket pengembangan perkebunan yang terdiri atas dua komponen yaitu:

1. Komponen utama, meliputi perluasan, peremajaan, dan rehabilitasi perkebunan rakyat
2. Komponen penunjang, meliputi unit pengolahan, infrastruktur, sarana, dan prasarana umum, pembinaan dan pengawalan

Komponen utama Revbun dibiayai dari perbankan serta subsidi bunga dari pemerintah, sementara itu komponen penunjang dibiayai oleh unit fungsional terkait.

Target nasional dari pengembangan areal yang ingin dicapai melalui peremajaan dan perluasan dari Program Revbun Karet adalah seluas 60 ribu s.d 85 ribu ha per tahun, sehingga pada akhir periode lima tahun pertama yaitu pada tahun 2010 dapat dicapai pengembangan areal karet seluas 300 ribu ha. Sementara itu secara khusus, target Program Revbun Karet untuk Provinsi Sumatera Selatan sampai tahun 2010 adalah seluas 40 ribu ha dan 20 ribu ha masing-masing untuk peremajaan dan perluasan, dengan rencana penyaluran kredit yang dapat dibiayai oleh BRI adalah 34 579 ha.

Target implementasi Program Revbun Karet yang telah dicanangkan sejak tahun anggaran 2006 tersebut ternyata belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena adanya berbagai kendala. Seminar Sehari ini dilaksanakan dengan harapan dapat menghimpun informasi dan meningkatkan koordinasi dari berbagai instansi yang terkait langsung dalam rangka menyukseskan Program Revbun Karet di Sumatera Selatan, seperti Pemerintah Daerah, Dinas Perkebunan, Bank Pelaksana, Badan Pertanahan Nasional, Dinas Kehutanan, Lembaga Penelitian, Penangkar Bibit Karet, dan Petani/Kelompok Tani/Koperasi. Oleh karena itu maka Seminar Sehari ini bertujuan untuk menginventarisasi keragaan dan menghimpun strategi serta kebijakan Program Revbun Karet untuk mendukung upaya percepatan implementasinya di Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan paparan materi yang disajikan oleh para nara sumber dan diskusi forum diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Prospek pasar karet alam dunia di masa mendatang masih terbuka, sehingga pengembangan areal dan peningkatan produksi karet melalui Program Revbun dapat dilakukan untuk mengisi peluang pasar tersebut
2. Implementasi Program Revbun Karet di Provinsi Sumatera Selatan menggunakan Pola Non-Kemitraan. Pada Pola Non-Kemitraan ini petani pekebun secara individual melalui Kelompok Tani/Koperasi mengajukan kredit ke Bank Pelaksana.
3. Pada dasarnya Program Revbun karet di Provinsi Sumatera Selatan telah berjalan walaupun hasilnya masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan.
 - a. Perkembangan Program Revbun Karet Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2007 (berdasarkan data dari BRI) adalah: 1) Dalam proses kredit untuk areal seluas 19 920 ha, dan 2) Telah direalisasi pencairan kreditnya untuk areal seluas 231 ha.
 - b. Program Revbun Karet yang telah sampai pada tahap Surat Keputusan Bupati (daftar nominatif petani) mencapai 11 878 KK petani untuk 26 347 ha, yang tersebar di Kabupaten Muara Enim, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, dan Ogan Ilir.
4. Masih terdapat kendala dalam pelaksanaan Program Revbun Karet, seperti kendala yang terdapat pada aspek koordinasi, teknis lapangan, pembiayaan oleh bank, pertanahan, dan petani. Upaya untuk mempercepat pelaksanaan Program Revbun Karet dapat dilakukan dengan: a) lebih memperlancar koor-

dinasi antarinstansi terkait, b) penyediaan bibit karet unggul yang memenuhi 6 tepat, peningkatan SDM dan fasilitasi PPL, dan penyelesaian rekonstruksi UPP, c) pemenuhan syarat yang ditentukan oleh bank dan peningkatan SDM perbankan, d) memperlancar penerbitan cover note/sertifikasi lahan dan peningkatan SDM juru ukur, e) petani dapat memenuhi pembiayaan awal secara partisipatif, syarat pertanahan, dan bank, dan f) dalam hal bunga kredit revbun pada masa pengembangan yang terlalu tinggi, diharapkan suku bunga kredit tersebut dapat disubsidi oleh Pemda melalui APBD I dan II hingga mencapai 0 %

5. BRI mengharapkan para stakeholder dan pemerintah dapat membangun sinergi sehingga calon debitur menjadi lebih bankable. Jika kondisi ini tercapai, maka BRI dapat meminimumkan dan memitigasi berbagai risiko eksternal seperti risiko lahan, risiko budidaya tanaman, dan risiko petani fiktif. Jaminan asuransi mengenai risiko kebakaran kebun juga diperlukan, dan diharapkan dapat diperoleh dari Pemerintah Daerah melalui APBD.
6. Penerbitan cover note dari BPN dapat mempercepat proses pelaksanaan Program Revbun Karet; cover note akan dijadikan sebagai bahan awal bagi BRI untuk memproses lebih lanjut permohonan kredit petani. Cover Note yang juga merupakan bahan awal untuk penerbitan sertifikat lahan petani diharapkan dapat memenuhi prinsip clear-clean-correct dari Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN), sehingga tidak menimbulkan masalah mengenai kepemilikan lahan petani di masa yang akan datang. Penerbitan cover note dapat dilaksanakan ketika telah ada kejelasan subyek (masyarakat petani) maupun obyek (tanah) yang didukung oleh partisipasi aktif petani. Kelompok tani (yang beranggotakan 20 s.d. 30 orang) disarankan dapat membentuk Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (Pokmasdartibnah) sebagai bentuk partisipasi masyarakat, sehingga proses penerbitan cover note/sertifikat lahan menjadi lebih lancar dan cepat.
7. Pada Program Revbun Karet, Dinas Kehutanan merekomendasikan bahwa perluasan areal perkebunan dapat dilakukan jika areal berada di luar kawasan hutan atau areal terlantar pada Areal untuk Penggunaan Lain (APL). Perluasan areal perkebunan juga bisa dilakukan di kawasan hutan jika telah dilakukan pelepasan kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK), namun demikian mekanisme ini harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan. Dinas Kehutanan berkewajiban melaksanakan upaya perlindungan terhadap kawasan hutan dengan menjamin status, fungsi, kondisi, dan kawasan hutan sesuai UU No. 41 tahun 1999 dan PP No. 45 tahun 2004 pasal 5 tentang Perlindungan Hutan.
8. Upaya untuk mempercepat pelaksanaan Program Revbun Karet dapat dilakukan melalui suatu manajemen Unit Pelaksana/Pelayanan Pengembangan (UPP), sementara itu dalam konteks koordinasi dan integrasi antarinstansi inti di lapangan dapat dibentuk Satuan Tugas (Task-Force)/Satgas yang beranggotakan Pemda/Kabupaten, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, BPN, dan Bank Pelaksana. Satgas ini perlu dibentuk supaya setiap masalah yang terjadi di lapangan dapat cepat direspon dan dipecahkan jalan keluarnya. Alokasi

pembiayaan pengawalan dan pendampingan Program Revbun Karet khususnya untuk biaya operasional petugas dari instansi terkait dapat diperoleh dari sumber dana APBD.

9. Keberhasilan Penerapan Program Revbun Karet di tingkat petani sangat ditentukan oleh kerjasama yang sinergis antarinstansi terkait, terutama Pemerintah (Kabupaten/Kota), Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, BPN, dan Bank Pelaksana, serta komitmen dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Daerah. Dukungan moral dari pimpinan daerah (Bupati/Walikota dan bahkan Gubernur) juga menjadi faktor pendorong terealisasinya Program Revbun Karet. Kegigihan dan kekompakan pengurus kelompok serta aparat desa dan kecamatan juga merupakan faktor penentu. Partisipasi aktif dari masyarakat petani (menyiapkan pembiayaan awal, menyiapkan alas hak tanah, menunjukkan batas-batas tanah, menyiapkan permohonan, dan syarat lainnya) juga sangat diperlukan. Seluruh stakeholder diharapkan dapat mendukung terealisasinya Program Revbun Karet.

Sembawa, 30 April 2008





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat-Nya maka Prosiding Seminar Sehari yang bertema "Strategi dan Kebijakan Mendukung Akselerasi Revitalisasi Perkebunan Karet di Sumatera Selatan" ini selesai disusun. Seperti kita ketahui bahwa Program Revitalisasi Perkebunan Karet merupakan bagian dari Program Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang telah dicanangkan oleh Presiden RI pada bulan Juni 2005 dan harus mulai dijalankan.

Seminar Sehari dilakukan dalam rangka menginventarisasi keragaan dan menghimpun strategi serta kebijakan Program Revitalisasi Perkebunan Karet untuk mendukung upaya percepatan implementasinya di Provinsi Sumatera Selatan. Untuk diketahui bahwa Seminar Sehari ini juga dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT Balai Penelitian Sembawa yang ke-26.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi aktif dalam menyukseskan Seminar Sehari tersebut. Ucapan terimakasih secara khusus kami sampaikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Perkebunan, Bank Pelaksana (BRI dan Bank Sumsel), Kanwil dan Kantor Badan Pertanahan Nasional, Dinas Kehutanan, Asosiasi Komoditas Karet (Gapkindo), Pusat Penelitian Karet, Balai Penelitian dan Pengkajian Teknologi, Universitas, Penangkar Bibit Karet, Petani/Kelompok Tani/Koperasi, dan Lembaga Swasta Lain.

Tiada gading yang tak retak, kami mohon maaf jika dalam penyelenggaraan Seminar Sehari dan menghimpun Prosiding ini masih terdapat kekurangan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan.

Balai Penelitian Sembawa
Kepala,

H. Khaidir Amypalupy

DAFTAR ISI

PERUMUSAN HASIL	iii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR & LAMPIRAN	xiii
PROSPEK PASAR KARET ALAM DAN PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN KARET	1
STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PERKEBUNAN MENDUKUNG REALISASI AKSELERASI PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN KARET DI SUMATERA SELATAN	15
STRATEGI DAN KEBIJAKAN BPN MENDUKUNG AKSELERASI REVITALISASI PERKEBUNAN KARET	35
SINKRONISASI KEBIJAKAN DINAS KEHUTANAN MENDUKUNG AKSELERASI REVITALISASI PERKEBUNAN KARET	41
SINERGI BRI – PEMERINTAH (DAERAH) DALAM MENYALURKAN KREDIT REVITALISASI PERKEBUNAN POLA NON KEMITRAAN PADA KANWIL BRI PALEMBANG	53
STRATEGI PENYEDIAAN BIBIT MENDUKUNG AKSELERASI PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN KARET DI PROVINSI SUMATERA SELATAN	73
AKSELERASI IMPLEMENTASI REVITALISASI PERKEBUNAN KARET DI PROVINSI SUMATERA SELATAN	93
JADWAL ACARA SEMINAR	119
DAFTAR PESERTA SEMINAR	121

DAFTAR TABEL

A.1.	Perkembangan Permintaan Karet Alam berdasarkan Negara/Regional Konsumen tahun 1980-2005	4
A.2.	Perkembangan Produksi Karet Alam berdasarkan Negara Produsen Utama Dunia tahun 1980-2005	5
A.3.	Produksi, Konsumsi, dan Stok Karet Alam dan Karet Sintetis tahun 2005-2007	5
A.4.	Pertumbuhan Ekonomi Dunia tahun 2006 dan 2007	6
A.5.	Harga Karet Alam tahun 2007-2008	7
A.6.	Target Awal Program Revitalisasi Perkebunan Karet tahun 2006-2010	8
A.7.	Rekapitulasi Penyaluran KPEN-RP sampai 31 Maret 2008	9
A.8.	Jumlah Petani/Peserta dan Calon Peserta Program Revitalisasi Perkebunan Karet Non-Kemitraan, 2008	10
D.1.	Luas Kawasan Hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 76/Kpts-II/2001 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006	44
D.2.	Progress Pelepasan Kawasan HPK untuk Perkebunan di Provinsi Sumatera Selatan	48
E.1.	Target Pengembangan Revitalisasi Perkebunan	56
E.2.	Rencana Penyaluran Kredit Rrevitalisasi Perkebunan Komoditas Karet Rakyat Pola Non-Kemitraan Kanwil BRI Palembang	61
E.3.	Rencana Penyaluran Kredit Revitalisasi Perkebunan Komoditas Kakao Pola Non-Kemitraan Kanwil BRI Palembang	62
E.4.	Rencana Penyaluran Kredit Rrevitalisasi Perkebunan Komoditas Kelapa Sawit Pola Kemitraan Kanwil BRI Palembang	63
E.5.	Realisasi Penyaluran Kredit Revitalisasi Perkebunan Pola Non-Kemitraan untuk Komoditas Karet Kanwil BRI Palembang per 31 Desember 2007	64
E.6.	Rencana dan Realisasi Penyaluran Kredit Revitalisasi Perkebunan Kanwil BRI Palembang tahun 2007	64
F.1.	Sasaran Kegiatan Intensifikasi, Peremajaan/ Rehabilitasi, Perluasan dan Diversifikasi melalui Program Revitalisasi Perkebunan tahun 2006-2010	76

F.2.	Perkembangan Program Revitalisasi Perkebunan Karet di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan April 2008	75
F.3.	Master Plan Peremajaan dan Pengembangan Karet di Sumatera Selatan per Tahun	78
F.4.	Luas Pengembangan Karet yang Dibiayai dengan Dana APBD I, APBD II, dan APBN tahun 2006-2007	78
F.5.	Estimasi Luas Pengembangan Karet Swadaya di Sumatera Selatan tahun 2007	79
F.6.	Total Luas Areal Penanaman Karet dan Kebutuhan Bibit Karet di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2007	80
F.7.	Luas Kebun Entres yang Dibiayai dengan Dana APBD I, APBD II, dan APBN di Sumatera Selatan tahun 2004-2007	81
F.8.	Perkiraan Potensi Bibit Karet di Sumatera Selatan tahun 2007	82
F.9.	Rekapitulasi Pengiriman Bibit Karet dengan Surat Keterangan Mutu (SKM) dari Provinsi Sumatera Selatan ke Berbagai Provinsi di Indonesia tahun 2005 -2007	82
F.10.	Total Kebun Entres (Bantuan dan Swadaya) tahun 2007	84
F.11.	Jadwal Waktu Penyiapan Bibit Karet dihubungkan dengan Harapan Pencairan Kredit Revitalisasi Perkebunan dan Teknis Budidaya	87
G.1.	Jumlah Contoh Nara Sumber	96
G.2.	Perkembangan Program Revbun Karet di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan April 2008	97
G.3.	Tahap Pelaksanaan Program Revbun Karet sampai dengan Pencairan Kredit di Bank Pelaksana di Provinsi Sumatera Selatan sampai April 2008	100
G.4.	Contoh Besaran Kredit Revbun Karet Petani pada Desember 2007	103
G.5.	Identifikasi Kendala Pelaksanaan Revbun Karet dan Alternatif Pemecahannya sampai dengan April 2008	104

DAFTAR GAMBAR & LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

A.1. Faktor-faktor Fundamental yang Mempengaruhi Harga Karet Alam	3
A.2. Perkembangan Harga Karet Alam DCP-IRCo tahun 2006-2008	7
D.1. Alur Legalitas Pengembangan Lahan Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan	46
D.2. Flow Chart Proses Pelepasan Kawasan Hutan	47
E.1. Sketsa Matriks SWOT/TOWS	58
E.2. Lingkungan Perusahaan/Bisnis	60
E.3. Matriks SWOT/TOWS Penyaluran Kredit Revitalisasi Perkebunan Non-Kemitraan	67
F.1. Sinkronisasi Penyediaan Dana dan Bibit dalam Program Revitalisasi Perkebunan Karet	87
G.1. Alur Proses Pelaksanaan Revbun Karet Pola Non-Kemitraan	97

DAFTAR LAMPIRAN

B.1. Program Gerbang Serasan (Gerakan Pembangunan Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Bumi Serasan Sekundang) Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan	21
B.2. Implementasi Pengembangan Karet Rakyat di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 1980/1981 s.d 2006	23
B.3. Alur Proses Pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan	25
G.1. Keberadaan Dokumen yang Berhubungan dengan Program Revbun Karet di Sumsel pada April 2008	116